



Pemda Minta PAUD & SD Menunda Tatap Muka

JOGJA—Pemda DIY meminta penundaan uji pembelajaran tatap muka (PTM) untuk satuan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai sekolah dasar (SD) di seluruh wilayah Bumi Mataram.

*Ujang Hasanudin, Lajeng Padmaratri,
& David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com*

Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten kota terkait dengan rencana penundaan tersebut.

► Penundaan belajar tatap muka PAUD-SD sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY.

► Tidak menutup kemungkinan akan ada pengambilan sampel *swab* bagi siswa yang sudah menyelenggarakan PTM.

Penundaan PTM di PAUD-SD sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY tentang Kebijakan Pendidikan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY.

► Halaman 6

Pemda Minta...

"Seharusnya begitu [Ditunda dulu untuk PTM PAUD-SD]. Sambil melihat hasil evaluasi yang dewasa dulu," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, Jumat (24/9).

Dalam SE Gubernur DIY No. 420/19096 yang ditandatangani 15 September 2021 disebutkan penerapan uji percontohan PTM terbatas dilaksanakan pada beberapa satuan pendidikan yang dianggap siap memenuhi kriteria untuk pencegahan Covid-19, khususnya satuan pendidikan yang warga sekolahnya sudah divaksin mencapai 80% dari jumlah keseluruhan.

Masih mengaku beleid itu, satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk penerapan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Didik mengatakan kewenangan SD dan SMP ada di pemerintah kabupaten dan kota sehingga Pemda tidak bisa mengintervensi. Namun dia berharap kebijakan PTM SD dan SMP harus mengacu pada SE Gubernur DIY, yakni salah satu syarat PTM adalah sekolah sudah menjalani vaksinasi minimal 80% untuk dosis pertama.

"Kalau SD kan belum [bisa divaksin] makanya kami sebenarnya konsep PTM bertahap dari yang siap dulu," ucap Didik. "Kami baru berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten dan kota, evaluasi."

Lebih lanjut Didik mengatakan Disdikpora juga masih mengevaluasi uji percontohan PTM di tingkat SMA dan SMK yang sudah berjalan sejak 20 September lalu. PTM tingkat SMA dan SMK, kata Didik, juga belum merata dilaksanakan meski sekolah telah memenuhi syarat vaksin 80%. Belum dimulainya PTM di beberapa sekolah karena masih ada yang sedang mengadakan penilaian tengah semester (PTS) sehingga PTM diundur sampai awal Oktober.

Sejauh ini Didik mengaku belum mendapatkan informasi adanya penularan Covid-19 di SMA dan SMK selama uji percontohan PTM. Namun Disdikpora akan mengevaluasi setiap hari penerapan protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Tidak menutup kemungkinan akan ada pengambilan sampel swab bagi siswa yang sudah menyelenggarakan PTM.

Didik Wardaya juga mengonfirmasi pemberitaan adanya 41 sekolah di DIY menjadi klaster penularan Covid-19. Dia sudah minta klarifikasi langsung ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) bahwa yang dimaksud 41 klaster sekolah tersebut merupakan akumulasi sejak pandemi

Covid-19 melanda atau sejak 2020 lalu, bukan setelah dimulainya PTM pada 20 September kemarin.

Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji juga mengatakan dalam SE Gubernur disampaikan yang diizinkan uji coba PTM adalah sekolah yang minimal 80% warga sekolahnya tervaksin.

Warga sekolah yang dimaksud, selain siswa juga pengajar dan pegawai administrasi sekolah. "Artinya, SD sebaiknya belum melaksanakan uji coba PTM, karena saat ini vaksinasi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berumur lebih dari 12 tahun," kata Ditya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Ali Ridlo, memastikan selama PTM terbatas baru satu sekolah yang terdapat penularan virus Corona. Upaya antisipasi terus dilakukan agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

Menurut dia, salah satu antisipasinya yakni mengevaluasi harian. Untuk sekolah diwajibkan melakukan prosedur pengecekan berkaitan dengan sarana prasarana pendukung pembelajaran sekolah mulai dari keberadaan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pemakaian masker hingga jaga jarak. Hasil dari pengecekan ini dilaporkan ke dinas melalui masing-masing bidang. "Jadi terus dipantau. Kalau memang ada penularan [seperti di SD Negeri Panggang 1] bisa ditutup sementara waktu hingga keadaan membaik," katanya.

Sekolah Ditutup

Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wicakana, menuturkan jika penularan terjadi di satuan pendidikan, sekolah sebaiknya ditutup dulu sementara waktu untuk mencegah penularan virus. Yang lebih penting kemudian ialah melakukan *tracing* secara menyeluruh.

"Terutama berkaitan dengan sumber penularannya dan ada atau tidak protokol kesehatan yang tidak berjalan. Sumber penularan ini penting untuk mengetahui masalahnya di sekolah atau di luar sekolah," kata Bayu.

Bayu beranggapan kebijakan pembelajaran tatap muka ini memang memiliki kelemahan yaitu tidak adanya evaluasi dari asesor terkait dengan penerapan protokol kesehatannya. "Kebanyakan asesornya bukan orang kesehatan atau orang yang mengerti hal itu. Jadinya serba standar saja yang dilakukan, seperti bikin wastafel, masker, jangan tukar alat makan, dan lain-lain," kata dia.

Menurutnya, pengawasan terhadap sekolah sebaiknya dilakukan oleh puskesmas terdekat dan dinas kesehatan setempat. Jika kurang sumber daya manusia, maka organisasi profesi seperti Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain-lain bisa turut diberdayakan. "Ada yang lebih penting untuk dievaluasi yaitu jalan atau tidaknya protokol ketika ada yang sakit, pengawasan siswa di luar sekolah bekerja sama dengan orang tua, dan jalur komunikasi sekolah dengan dinas kesehatan," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Herie Poerwadi, menjawab terdapatnya klaster Covid-19 di sekolah. Pengetatan prosedur dilakukan saat siswa masuk sekolah, penjemputan maupun saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) digelar. Herie juga mengimbau agar pengawasan dilakukan pula saat murid berada di luar kelas. "Kadang-kadang yang abai hanya memperhatikan yang di [dalam] kelas, harus diantisipasi apa yang tidak terjadi di kelas apa yang terjadi saat antar jemput. Nah makanya sejak awal kami antisipasi anak-anak masuk tidak diperbolehkan ngobrol di luar kelas," ujarnya.

Klaster PTM

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat masih ada ratusan pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa yang terdeta sebagai kasus aktif Covid-19 saat ini.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan hingga saat ini sedang menjalani perawatan. "Jadi memang kasus aktif yang ada di satuan pendidikan,

terlapor Covid-19 ada 222 orang. Kemudian peserta didik itu ada 156 orang yang terlapor Covid," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri dalam jumpa pers, Jumat.

Jumeri mengklarifikasi data 11.615 siswa dan 7.307 guru yang tersebar di 1.296 klaster sekolah itu bukanlah kasus aktif, melainkan akumulasi kasus sejak Juli 2020 lalu saat pemerintah mulai mengizinkan PTM.

"Jadi itu akumulasi sejak Juli 2020, atau Tahun Ajaran 2020/2021 sampai 2020/2022 bulan September ini. Itu masa 14 bulan dari perjalanan pembelajaran di Indonesia baik yang PTM maupun belum PTM," jelasnya.

Data yang ditampilkan di laman sekolah.data.kemdikbud.go.id menurutnya juga belum terverifikasi, sehingga validitasnya masih akan diperiksa ulang. (Yosef Leon Pinkske, Suara.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005